



Judul : Saat partai berjibaku agar pileg tak dilupakan
Tanggal : Minggu, 03 September 2023
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 3

Saat Partai Berjibaku agar Pileg Tak Dilupakan

Publik menganggap isu pilpres seolah lebih "seksi" ketimbang pileg. Akibat, narasi pilpres lebih mengemuka. Fenomena ini menjadi tantangan bagi partai untuk menjajaliskan pileg kepada khalayak.

Pagi-pagi benar, Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB menggelar rapat pleno di kantornya di Jakarta, Jumat (3/9/2023). Selang tujuh jam kemudian, rapat pleno membahas tawaran Partai Nasdem untuk menduduki Anies Baswedan dengan Mubandri Iskandar, Ketua Umum PKB, dalam Pemilu Presiden 2024, di lingkungan di Surabaya, Jawa Timur. Hasilnya, PKB menerima tawaran Nasdem dan menandatangani dukungannya kepada Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra.

Pada hari yang sama, Majelis Tinggi Partai Demokrat menggelar rapat darurat di Cikoes, Bogor, Jawa Barat, untuk membahas perkara yang sama, keputusan Nasdem menduduki Anies dengan Mubandri. Rapat darurat yang dipimpin langsung Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono itu menghasilkan dua kesepakatan. Pertama, Demokrat menandatangani dukungan kepada Anies. Kedua, Demokrat keluar dari koalisi Perubahan untuk Persatuan yang sebelumnya dibentuk bersama Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Demokrat merasa kecewa karena menurut mereka, secara serentak, Publik menganggap isu pilpres lebih seksi dibandingkan isu pemilu legislatif (pileg). Meski demikian, bagi Maman, jika dilihat secara objektif, pilpres dan pileg se-sungguhnya memiliki bobot yang sama. Dalam pilpres, rakyat akan memilih presiden dan wakil presiden yang akan menjalankan pemerintahan selama lima tahun ke depan. Begitu pula dalam pileg, rakyat akan memilih wakil-wakil mereka untuk memengaruhi kebijakan pemerintah.

Tetapi, kan, itu pandangan kami secara objektif. Kami pandangan publik melihatnya bisa jadi berbeda. Ya, sudahlah, kami jalani saja," kata Maman.

Tak lebih tinggi
PDI-P juga memandang bobot bobot pileg dan pilpres sama. Karena itu, menurut Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Kresnawati, partainya tidak pernah memprioritaskan isu pilpres lebih tinggi dibandingkan pileg ataupun sebaliknya. Sebab, bagi PDI-P, pilpres dan pilpres sama pentingnya dan diperjuangkan dalam satu tarikan napas.

Beragam telah ditetapkan daftar calon sementara (DAS) anggota DPR ataupun DPRD provinsi dan kabupaten/kota, semua langkah bergerak. Tak hanya menyoal-aliskan diri, ideologi serta program partai, bakal caleg juga menyoal-aliskan Gajarnya, bakal capres yang ditetapkan Partai Umum PDI-P Megawati Sukarnoputri.

"Antara bakal caleg dan capres Ganjar Pranowo selalu *connected*. Strategi kampanye caleg dan capres sama, yakni penggalangan, sosialisasi politik, dan melakukan hal konkret bagi rakyat," ucap Hastuti.

Sejak KPU mengumumkan penetapan DAS pada 19 Agustus lalu, hal itu sudah membangkitkan partai caleg PDI-P untuk semua tingkatan lembaga perwakilan berantakan di berbagai daerah. Umumnya, dalam hal ini partai caleg yang mengajukan diri untuk bisa menyoal-aliskan tawaran partai caleg lainnya.

Menurut Hastuti, para bakal caleg PDI-P memang diprioritaskan sebagai sebuah momentum untuk bisa menyoal-aliskan tawaran partai caleg lainnya.

Kepada bakal caleg yang sudah ditetapkan lewat pakdote, wawancara mendalam, pengisian di akar rumput, dan kemampuan komunikasi politik, serta penggalangan menjajaliskan siapa yang akan memenangkan tiga fungsi itu sekaligus," kata Hastuti.

Strategi serupa diumumkan Partai Gerindra. Ketua Hartan Partai Gerindra Sufmi Doso Ahmad menegaskan, sejak awal, Gerindra memprioritaskan pilpres dan pileg sama pentingnya. Dan pilpres dan pileg sama-sama penting untuk dimenangkan oleh partai. Oleh karena itu, Gerindra juga memprioritaskan pilpres dan pileg sama pentingnya.



Balho bakal calon anggota legislatif berjejer di pinggir Jalan Raya Anyer, Kecamatan Cwandan, Kota Cilegon, Banten, Selasa (29/8/2023). Meski belum masuk masa kampanye, para bakal calon anggota legislatif ataupun bakal calon presiden mulai gear melakukan sosialisasi ke masyarakat.

Politika, Nachradin, melihat, terpuasnya perhatian publik kepada pilpres ini memang cenderung terjadi ketika pemilu digelar secara serentak. Situasi semacam ini juga pernah terjadi pada Pemilu 2014 dan 2019.

Pada Pemilu 2019, misalnya. Langkaran Survei Indonesia (LSI) pernah menemukan bahwa 70 persen perancang publik kala itu dalam rangka menjajaliskan pilpres. Ini membuat pilpres lebih mendominasi ruang yang cukup dalam diskusi publik.

Alasannya mungkin karena pilpres lebih mudah menjangkau perhatian pilpres karena hanya ada beberapa nama yang muncul. Sementara itu, dalam pilpres, pilihan nama sangat banyak dan kecenderungan publik lebih menjangkau nama partai politik yang di dukung. Di luar itu juga ada pengaruh dari media yang lebih fokus pada pilpres," tuturnya.

Nachradin tak menyangka, situasi ini justru memunculkan optimisme publik terhadap perolehan pilpres. Terlebih, ketika terjadi cederung tak terlihat di kalangan masyarakat. Masyarakat lebih merasakan kebangsaan kebangsaan yang lebih baik daripada kebangsaan yang lebih buruk, maupun presiden.

"Akhir, animo masyarakat cenderung lebih tinggi di pemilihan eksekutif baik itu pilpres, pilkada, pilgub atau pilbup," ucapnya.

Meski demikian, lanjut Nachradin, sebenarnya partai politik juga bisa memuat undang-undang dari pemilu serentak. Ini terutama berlaku bagi partai politik yang menggunakan kaderisasi sendiri sebagai capres ataupun capres. Sebab, pada saat kampanye, para bakal caleg tak hanya mempromosikan dirinya, tetapi juga capres yang diusung partainya.

Karena itu, pileg menjadi pekerjaan berat bagi partai politik yang tidak menggunakan kaderisasi di pilpres. Caleg harus berpromosi terus memposisikan dirinya di depan. Pilihan lain adalah partai memprioritaskan diri, tetapi juga capres yang diusung partainya.

Karena itu, pileg menjadi pekerjaan berat bagi partai politik yang tidak menggunakan kaderisasi di pilpres. Caleg harus berpromosi terus memposisikan dirinya di depan. Pilihan lain adalah partai memprioritaskan diri, tetapi juga capres yang diusung partainya.

Tanpa ke penilih
PKS juga tidak ingin merespons dinamika pilpres secara berlebihan. Juru Bicara PKS Ahmad Mubandri mengatakan, kebijakan itu bertujuan agar pengantar dan kader bisa tetap berfokus pada pemenuhan pilpres.

Di tengah tantangan terpuasnya isu pilpres, PKS memprioritaskan pilpres dan pileg yang telah ditetapkan dalam nomor surat partai 06/ta gambar wajah Prabowo Subianto.

"PKS juga tidak ingin merespons dinamika pilpres secara berlebihan. Juru Bicara PKS Ahmad Mubandri mengatakan, kebijakan itu bertujuan agar pengantar dan kader bisa tetap berfokus pada pemenuhan pilpres."

Di sisi lain, sosialisasi melalui alat peraga kampanye, seperti balok, spanduk, dan media sosial, diumumkan Partai Gerindra melalui berbagai jalur ini dilakukan agar masyarakat melihat gegap gempita pilpres dan tidak hanya fokus pada pilpres. "Interaksi langsung menjadi hal sangat penting agar sokongan caleg dengan pemilih tidak mudah hilang akibat terputus perhatian dengan pilpres," ujar Mubandri.

Strategi melalui berbagai jalur ini dilakukan agar masyarakat melihat gegap gempita pilpres dan tidak hanya fokus pada pilpres. "Interaksi langsung menjadi hal sangat penting agar sokongan caleg dengan pemilih tidak mudah hilang akibat terputus perhatian dengan pilpres," ujar Mubandri.

Sigit menyadari, efek ekor jas *coat-tail effect* secara umum hanya berpengaruh besar pada partai yang kaderisasi dianggap menjadi capres dan caleg. Untuk itu, PSI tidak terlalu memprioritaskan efek ekor jas dalam pemenuhan pilpres. Strategi kami turan langsung ke masyarakat untuk memprioritaskan program-program utama PSI, seperti BPJS gratis, kuliah gratis, dan mengadopsi Undang-Undang Perpajakan ASU," tuturnya.

Situsi berulang
Andis politik dari Ketua

pesen pengantar hak pilih. Kondisi pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) lebih tenang. Pada 29 juta atau 10 persen suara pemilih DPD yang dirampalkan tidak sah. Kebanyakan surat suara dibetulkan tidak sah karena dibetulkan kosong atau tidak terobol oleh pemilih.

Selain itu, pileg yang tidak mendapat perhatian memadai dari pemilih akan membuat caleg bermasalah atau pernah punya rekam jejak. Terlebih, ketika terjadi cederung tak terlihat di kalangan masyarakat. Masyarakat lebih merasakan kebangsaan kebangsaan yang lebih baik daripada kebangsaan yang lebih buruk, maupun presiden.

"Akhir, animo masyarakat cenderung lebih tinggi di pemilihan eksekutif baik itu pilpres, pilkada, pilgub atau pilbup," ucapnya.

Meski demikian, lanjut Nachradin, sebenarnya partai politik juga bisa memuat undang-undang dari pemilu serentak. Ini terutama berlaku bagi partai politik yang menggunakan kaderisasi sendiri sebagai capres ataupun capres. Sebab, pada saat kampanye, para bakal caleg tak hanya mempromosikan dirinya, tetapi juga capres yang diusung partainya.

Karena itu, pileg menjadi pekerjaan berat bagi partai politik yang tidak menggunakan kaderisasi di pilpres. Caleg harus berpromosi terus memposisikan dirinya di depan. Pilihan lain adalah partai memprioritaskan diri, tetapi juga capres yang diusung partainya.

Karena itu, pileg menjadi pekerjaan berat bagi partai politik yang tidak menggunakan kaderisasi di pilpres. Caleg harus berpromosi terus memposisikan dirinya di depan. Pilihan lain adalah partai memprioritaskan diri, tetapi juga capres yang diusung partainya.

Karena itu, pileg menjadi pekerjaan berat bagi partai politik yang tidak menggunakan kaderisasi di pilpres. Caleg harus berpromosi terus memposisikan dirinya di depan. Pilihan lain adalah partai memprioritaskan diri, tetapi juga capres yang diusung partainya.

Karena itu, pileg menjadi pekerjaan berat bagi partai politik yang tidak menggunakan kaderisasi di pilpres. Caleg harus berpromosi terus memposisikan dirinya di depan. Pilihan lain adalah partai memprioritaskan diri, tetapi juga capres yang diusung partainya.

Di sisi lain, RPKU juga harus lebih gear ke dalam menyoal-aliskan tentang pemilu serentak yang bukan hanya pilpres, melainkan juga ada pileg. RPKU perlu proaktif memprioritaskan partai dan caleg melalui keterbukaan riwayar hidup. Sebab, publik butuh akses informasi kepemilihan yang lebih mudah dan kredibel agar bisa membuat keputusan dengan tepat.

Di sisi lain, RPKU juga harus lebih gear ke dalam menyoal-aliskan tentang pemilu serentak yang bukan hanya pilpres, melainkan juga ada pileg. RPKU perlu proaktif memprioritaskan partai dan caleg melalui keterbukaan riwayar hidup. Sebab, publik butuh akses informasi kepemilihan yang lebih mudah dan kredibel agar bisa membuat keputusan dengan tepat.

Di sisi lain, RPKU juga harus lebih gear ke dalam menyoal-aliskan tentang pemilu serentak yang bukan hanya pilpres, melainkan juga ada pileg. RPKU perlu proaktif memprioritaskan partai dan caleg melalui keterbukaan riwayar hidup. Sebab, publik butuh akses informasi kepemilihan yang lebih mudah dan kredibel agar bisa membuat keputusan dengan tepat.

Di sisi lain, RPKU juga harus lebih gear ke dalam menyoal-aliskan tentang pemilu serentak yang bukan hanya pilpres, melainkan juga ada pileg. RPKU perlu proaktif memprioritaskan partai dan caleg melalui keterbukaan riwayar hidup. Sebab, publik butuh akses informasi kepemilihan yang lebih mudah dan kredibel agar bisa membuat keputusan dengan tepat.

Di sisi lain, RPKU juga harus lebih gear ke dalam menyoal-aliskan tentang pemilu serentak yang bukan hanya pilpres, melainkan juga ada pileg. RPKU perlu proaktif memprioritaskan partai dan caleg melalui keterbukaan riwayar hidup. Sebab, publik butuh akses informasi kepemilihan yang lebih mudah dan kredibel agar bisa membuat keputusan dengan tepat.

Di sisi lain, RPKU juga harus lebih gear ke dalam menyoal-aliskan tentang pemilu serentak yang bukan hanya pilpres, melainkan juga ada pileg. RPKU perlu proaktif memprioritaskan partai dan caleg melalui keterbukaan riwayar hidup. Sebab, publik butuh akses informasi kepemilihan yang lebih mudah dan kredibel agar bisa membuat keputusan dengan tepat.

Di sisi lain, RPKU juga harus lebih gear ke dalam menyoal-aliskan tentang pemilu serentak yang bukan hanya pilpres, melainkan juga ada pileg. RPKU perlu proaktif memprioritaskan partai dan caleg melalui keterbukaan riwayar hidup. Sebab, publik butuh akses informasi kepemilihan yang lebih mudah dan kredibel agar bisa membuat keputusan dengan tepat.

Di sisi lain, RPKU juga harus lebih gear ke dalam menyoal-aliskan tentang pemilu serentak yang bukan hanya pilpres, melainkan juga ada pileg. RPKU perlu proaktif memprioritaskan partai dan caleg melalui keterbukaan riwayar hidup. Sebab, publik butuh akses informasi kepemilihan yang lebih mudah dan kredibel agar bisa membuat keputusan dengan tepat.

Di sisi lain, RPKU juga harus lebih gear ke dalam menyoal-aliskan tentang pemilu serentak yang bukan hanya pilpres, melainkan juga ada pileg. RPKU perlu proaktif memprioritaskan partai dan caleg melalui keterbukaan riwayar hidup. Sebab, publik butuh akses informasi kepemilihan yang lebih mudah dan kredibel agar bisa membuat keputusan dengan tepat.

(NUSOUAS HARBOUWO)

(KUGU, KASIBARO)